

Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat

A Portrait of the Findings of the Implementation of Development in the Education Sector: A Case Study of the Special Transfer Funds in West Java Province

Andi Setyo Pambudi

Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta
Email: andi.pambudi@bappenas.go.id

Naskah diterima tanggal 22 Agustus 2023. Naskah direvisi tanggal 9 November 2023.
Naskah disetujui tanggal 5 Desember 2023.

Abstrak

Bidang pendidikan adalah salah satu bagian penting pembangunan nasional yang pada hakikatnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan bidang ini diwujudkan dalam serangkaian program dan kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Hal yang menarik terkait isu ini dilapangan adalah kesenjangan fiskal. Upaya untuk menyeimbangkan ketimpangan fiskal di bidang Pendidikan dilakukan pemerintah pusat melalui perimbangan keuangan dalam bentuk dana transfer ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reviu terhadap siklus perencanaan dan pelaksanaan dana transfer, terutama DAK untuk penugasan fisik bidang pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* (kualitatif dan kuantitatif) dengan data numerik baik sekunder maupun primer. Pengumpulan data diperoleh melalui *Focus Group Discussion*, *big data*, dan kuesioner. Pengolahan big data sebagai bagian analisis memanfaatkan aplikasi *Intelligent Media Monitoring (IMM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan kemampuan sumber daya manusia pengelola dana transfer di daerah dalam menyusun proposal DAK masih sangat tinggi. Disparitas ini semakin nyata dengan perbedaan aksesibilitas informasi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, penentuan alokasi anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kebutuhan akreditasi sekolah, serta kurangnya transparansi dan audit publik dalam pengelolaan dana perimbangan terkait pendidikan. Oleh karena itu berbagai terobosan sejak aspek perencanaan dan pelaporan diperlukan, termasuk juga strategi pelaksanaan yang adaptif terhadap ragam kondisi masyarakat, kondisi geografis dan sumber daya pengelola dana transfer bidang pendidikan di daerah.

Keywords: Dana Transfer; Pendidikan; Kebijakan; *Big Data*

Abstract

The education sector is an essential part of national development, essentially carried out to improve the quality of human resources. In practice, development policies in this field manifest in a series of programs and activities involving central and regional governments. The exciting thing related to this issue is the fiscal gap. The central government works to balance fiscal inequality in the education sector through financial balancing through the regional transfer funds. This study aims to review the cycle of planning and implementing transfer funds, especially Special Allocation Funds for physical assignments in the education sector in Indonesia. This study uses a mixed method approach (qualitative and quantitative) with both secondary and primary numerical data. Data collection was obtained through Focus Group Discussions, big data, and questionnaires. Big data processing utilizes the Intelligent Media Monitoring (IMM) application as part of the analysis. The study results show that the gap in the ability of human resources to manage transfer funds in the regions in preparing proposals is still very high. This disparity is increasingly evident with differences in information accessibility between urban and rural areas, the determination of budget allocations that do not fully reflect the magnitude of the need for school accreditation, and the lack of transparency and public audits in the management of balance funds related to education. Therefore, various breakthroughs from the planning and reporting aspects are needed, including an implementation strategy that is adaptive to the diverse conditions of society, geographical conditions, and resources for managing transfer funds in the education sector in the regions.

Keywords: *Transfer Funds; Education; Policy; Big Data*

PENDAHULUAN

Masalah perimbangan keuangan adalah isu kompleks yang sering muncul serta melibatkan alokasi sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pada pembangunan yang terkait sektor pendidikan. Jika proses perencanaan tidak melibatkan pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lokal, maka implementasi dana transfer khusus mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setempat. Masalah ketidaksetaraan dapat timbul jika pembagian dana tidak memperhatikan kebutuhan dan kapasitas masing-masing daerah. Ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan. Pemecahan masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah sektor pendidikan sering memerlukan pendekatan yang komprehensif dan keseimbangan antara otonomi daerah dan koordinasi kebijakan nasional.

Bidang pendidikan adalah salah satu bagian penting pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ([Akilah, 2019](#)). Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan bidang ini diwujudkan dalam serangkaian program dan kegiatan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah ([Pambudi et al., 2021](#)). Upaya untuk menyeimbangkan ketimpangan fiskal di bidang pendidikan dilakukan pemerintah pusat melalui perimbangan keuangan dalam bentuk dana transfer ke daerah. Bidang pendidikan

merupakan salah satu bidang pembangunan yang dibiayai oleh DAK Penugasan Fisik ([Pemerintah RI, 2018a](#); [Pemerintah RI, 2004a](#); [Pemerintah RI, 2004b](#)).

Anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas nasional ([Pemerintah RI, 2018c](#); [Pemerintah RI, 2018d](#)). Tujuan dari DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan nonformal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan atau satuan pendidikan yang memenuhi kriteria.

Pasal 13 ayat 2 bagian c Peraturan Presiden (Perpres) No. 141 Tahun 2018 secara khusus menyebutkan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian keluaran, serta dampak dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan di setiap bidang DAK Fisik yang menjadi prioritas nasional ([Pemerintah RI, 2018b](#)). Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan menjadi topik yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pelayanan dasar yang menyentuh langsung masyarakat banyak. Selain itu, kajian mengenai Fisik DAK Bidang Pendidikan menjadi penting untuk menilai efektivitas, relevansi, dan efisiensi menu kegiatan yang ada karena selama ini bidang tersebut identik dengan anggaran yang besar (termasuk salah satu belanja wajib yang dijamin oleh undang-undang), menjadi prioritas nasional/daerah, dan memiliki cakupan wilayah yang luas. Bidang pendidikan merupakan hal yang sering disorot oleh media dalam kaitannya dengan berbagai isu tata kelola pemerintahan, sehingga perlu dikaji lebih dalam, tidak hanya dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya tetapi juga aspek sentimen publik.

Anggaran yang bersumber dari DAK cukup signifikan untuk pembangunan pendidikan karena pemerintah daerah memprioritaskan pengeluaran anggaran pemerintah daerah untuk kebutuhan pegawai ([Pemerintah RI, 2018a](#)). Keberadaan DAK untuk pendidikan menambah nilai dan porsi anggaran pendidikan terhadap total belanja daerah. Beberapa studi kebijakan telah mencatat temuan-temuan penting terkait efektivitas pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan. [Amelia et al. \(2019\)](#) telah meneliti pengaruh DAK bidang pendidikan terhadap belanja daerah. Mereka menyimpulkan bahwa DAK bidang

pendidikan hanya berpengaruh sebesar 0,18% terhadap belanja daerah yang dikategorikan memiliki pengaruh yang sangat rendah. Menurut penelitian [Amelia et al. \(2019\)](#), belanja sektor pendidikan tidak memediasi pengaruh DAK terhadap *outcome* di sektor pendidikan. Hasil penelitian [Amelia et al., \(2019\)](#) tidak sejalan dengan hasil penelitian [Tuasikal \(2008\)](#), serta [Larasati & Saputra \(2014\)](#) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah sektor pendidikan.

Hal yang menarik terkait isu dana transfer bidang pendidikan dilapangan adalah kesenjangan fiskal. Upaya untuk menyeimbangkan ketimpangan fiskal di bidang pendidikan dilakukan pemerintah pusat melalui perimbangan keuangan dalam bentuk dana transfer ke daerah. Pada tahun 2019, dana transfer khusus terbesar untuk bidang pendidikan diterima oleh Provinsi Jawa Barat. Selain itu provinsi ini juga menjadi daerah yang memiliki sekolah terbanyak di Indonesia dan selalu menjadi atensi publik dalam media. Studi kasus di lokasi ini diperlukan untuk memperkuat dan mengkonfirmasi hasil analisis kesenjangan perencanaan dan analisis berita berbasis *big data* untuk dana transfer, khususnya DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reviu terhadap pelaksanaan dana transfer khusus, terutama DAK fisik bidang pendidikan di Indonesia dengan penekanan studi kasus pada Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam studi ini antara lain melihat bagaimana profil dana transfer khusus di Indonesia dan Jawa Barat pada bidang Pendidikan. Apa saja kendala pelaksanaan dana transfer khusus bidang Pendidikan dari sisi media dan dari sisi pengelola di daerah serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki perencanaan dana transfer khusus di masa depan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemangku isu strategis pelaksanaan DAK ditingkat tapak, serta upaya perbaikan perencanaan yang harus dilakukan agar berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pola berpikir ilmiah dalam bidang kebijakan publik, dan perencanaan pembangunan nasional di daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem desentralisasi yang diterapkan sejak lahirnya era reformasi merupakan bentuk penolakan terhadap sistem sentralisasi yang telah gagal dalam berbagai aspek untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem sentralisasi selalu dianggap mengusung penyatuan kekuasaan politik dan ekonomi di tangan pemerintah pusat, sehingga sebagai gantinya, desentralisasi mengajukan gagasan pembagian kewenangan

politik, ekonomi, dan administratif antara pemerintah pusat dan daerah ([Wandira, 2013](#)). Distribusi "kue kesejahteraan" tidak dari atas ke bawah, tetapi kekayaan daerah mengalir ke pusat. Hal ini merupakan bentuk dari praktik teori ekonomi neo-klasik yang melahirkan ketimpangan pendapatan.

Pengalaman di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi ([Bonet, 2006](#)). Otonomi daerah merupakan salah satu landasan demokratisasi yang memiliki tujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ([Hirawan, 2007](#)).

Skema pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka otonomi daerah merupakan kebutuhan yang mendasar. Salah satu skema yang memperhatikan kepentingan pemerintah pusat di daerah adalah dana transfer khusus. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah ([Santoso & Sapari, 2017](#)). Salah satu bentuk dari dana transfer tersebut adalah DAK, baik fisik maupun nonfisik. DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional ([Pemerintah RI, 2018a](#)).

Memasuki era desentralisasi yang dimulai sejak tahun 2001, Pemerintah Pusat tetap memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah ([Santoso & Sapari, 2017](#); [Wandira, 2013](#)). Pemerintah Pusat mentransfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Hingga saat ini, dana perimbangan masih menjadi penerimaan daerah terbesar ([Pemerintah RI, 2018a](#); [Permatasari & Mildawati, 2016](#); [Faridi, 2011](#)).

Anggaran DAK bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional ([Ibrahim & Abdul, 2019](#); [Marzel, 2013](#)). Kontribusi DAK sangat kecil dari total dana perimbangan, namun dana ini memiliki peran strategis dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah di tengah kemampuan keuangan daerah sangat terbatas dan kualitas belanja

daerah juga sangat rendah. Jika dikelola dengan baik, dana ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan mengurangi kerusakan infrastruktur (Permatasari & Mildawati, 2016). Hal ini sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing ([Mutiah, 2017](#)).

Perolehan dan penggunaan DAK oleh daerah harus mengikuti arahan dari pemerintah pusat ([Ibrahim & Abdul, 2019](#); [Pemerintah RI, 2018b](#)). Dana ini dialokasikan dalam anggaran pemerintah pusat untuk daerah tertentu guna mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Oleh karena itu, dalam konteks evaluasi pembangunan, analisis implementasi DAK bidang pendidikan menjadi relevan untuk diulas karena melibatkan dana pemerintah pusat yang paling banyak dimanfaatkan di daerah untuk mendanai sarana dan prasarana fisik dalam rangka mendukung pembangunan nasional di daerah ([Pemerintah RI, 2018c](#))

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* (kualitatif dan kuantitatif) dengan data numerik baik sekunder maupun primer. Pengumpulan data diperoleh melalui *Focus Group Discussion*, *big data*, dan kuesioner. Pengolahan big data sebagai bagian analisis memanfaatkan aplikasi *Intelligent Media Monitoring (IMM)*. Dalam analisis kebijakan, pendekatan *content analysis* digunakan untuk mengkaji teori-teori yang relevan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan DAK Fisik, khususnya di bidang Pendidikan. Penelitian ini juga melakukan analisis terhadap media berita dengan menggunakan perangkat *Intelligent Media Management (IMM)*. Perangkat ini adalah sebuah sistem yang bekerja 24 jam secara *real time*, otomatis, dengan sebuah robot yang memonitoring media dengan mengumpulkan konten-konten berupa media daring, media cetak, dan media televisi. *Intelligence Media Management* memberikan kajian lengkap mulai dari *influencer*, *top issue*, sentimen, perbandingan, dan pencarian detail objek berita ([Pambudi, 2021](#)). Analisis dilakukan secara deskriptif dari Trend perkembangan berita yang dimuat oleh media (media cetak dan media *daring*) terkait pelaksanaan DAK Fisik 2019 di daerah. Aplikasi IMM memfasilitasi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data informasi ke dalam analisis sentimen. Namun, IMM memiliki kekurangan dalam proses pengklasifikasian kalimat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Periode cakupan yang dianalisis oleh IMM pada periode 1 Januari - 31 Oktober 2020 dengan kata kunci yang digunakan adalah:

((“DAK” OR “DAK”) AND (“pendidikan” OR “SMK”) AND (“daerah” OR “pemda” OR “pemerintah daerah”) AND “fisik”))

Poin-poin yang dicari dalam analisis pemberitaan pelaksanaan DAK Fisik tahun 2019 adalah: a) Statistik deskriptif pemberitaan, seperti Trend pemberitaan, jumlah pemberitaan di setiap provinsi, daerah yang paling banyak memberitakan DAK, dan media yang paling banyak memberitakan DAK. b) Trend isu dan analisis sentimen pemberitaan. c) Permasalahan dan kendala yang terjadi di daerah. d) *Outcome* dari *output* yang dihasilkan (manfaat yang dirasakan masyarakat). e) Rasio cakupan pemberitaan per DAK bidang Fisik. Sementara itu, analisis dokumen perencanaan pusat-daerah menggunakan analisis kesenjangan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 di 34 provinsi yang bertemakan pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui kunjungan lapangan pada tema DAK Fisik Pendidikan 2019, terbatas pada DAK Penugasan. Dalam perspektif evaluasi pembangunan, analisis kesenjangan dengan membandingkan menu DAK dalam RKP 2019 dengan bidang prioritas dalam RPJMN 2019 menjadi penting untuk mengetahui relevansi dan kesesuaian kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Makin selaras antara prioritas pusat dan daerah dapat mendorong implementasi yang lebih optimal karena memiliki tujuan yang sama dengan yang tidak/kurang sesuai. Kunjungan lapangan di Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam bentuk diskusi (*Focused Discussion Groups*), wawancara dan pengamatan langsung di lokasi pembangunan/pelaksanaan kegiatan DAK. Provinsi Jawa Barat dipilih karena pada sektor pendidikan, daerah ini mendapatkan anggaran DAK yang paling besar di Indonesia. Studi kasus di lokasi ini diperlukan untuk memperkuat dan mengkonfirmasi hasil analisis kesenjangan perencanaan dan analisis berita berbasis big data untuk DAK Bidang Pendidikan Fisik tahun 2019.

HASIL DAN DISKUSI

Profil Dana Transfer Khusus di Indonesia: Bidang Pendidikan di Jawa Barat

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan nonformal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan atau satuan pendidikan yang memenuhi kriteria dalam ketentuan ini. Satuan pendidikan yang dimaksud berupa: 1) Taman Kanak-kanak (TK) yang

diselenggarakan oleh Pemerintah; 2) Sekolah Dasar (SD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat; 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat; 4) Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat; 5) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat; 6) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDSL)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Luar Biasa (SLB) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat; 7) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang diselenggarakan oleh Pemerintah DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas DAK Reguler, DAK Afirmasi, dan DAK Penugasan. Sasaran DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan hanya ditujukan untuk Sekolah Menengah Kejuruan.

Evaluasi Pelaksanaan Dana Transfer Pendidikan: Studi Kasus di Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat mendapatkan anggaran DAK Fisik Penugasan Pendidikan sebesar Rp193.839.118.000,00, dan sebagian besar digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru dan ruang praktik siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penelitian ini melakukan survei melalui kuesioner terhadap 82 SMK penerima DAK 2019 di Jawa Barat. Berdasarkan hasil survei terhadap SMK penerima DAK tahun 2019, kegiatan DAK memiliki relevansi yang baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 99 persen dana DAK telah sesuai dengan usulan sekolah, dan 90 persen telah memenuhi kebutuhan sekolah. Sebanyak 10 persen yang mengalami ketidaksesuaian kebutuhan anggaran di mana dana DAK yang diterima lebih kecil dari kebutuhan anggaran pembangunan yang telah direncanakan sekolah. Sebanyak 98 persen setuju bahwa anggaran DAK Fisik Penugasan Pendidikan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah SMK. Survei juga menunjukkan bahwa 89 persen penerima manfaat setuju bahwa anggaran DAK akan mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penerima DAK lebih mengutamakan sarana prasarana ruang praktik siswa yang memadai dibandingkan sarana prasarana laboratorium dasar (IPA, Biologi, Fisika, Kimia) sesuai dengan standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 4 Tahun 2008. Berdasarkan data dari 82 responden SMK penerima DAK di Jawa Barat, hasil kuesioner menunjukkan hanya 25,9 persen yang memiliki sarana prasarana laboratorium IPA dan 7,4 persen Laboratorium Biologi. Hanya 19 persen - 25 persen SMK penerima DAK yang memenuhi sarana prasarana Laboratorium

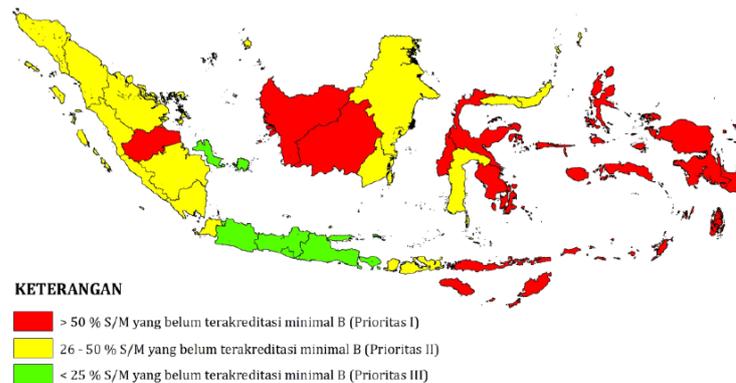
IPA yang lengkap, sesuai dengan Permendiknas No. 40 Tahun 2008. Sekolah penerima DAK hanya 7,4 persen - 8,6 persen yang memenuhi kelengkapan sarana prasarana Laboratorium Biologi sesuai standar PerMen No 40 Tahun 2018. Hal yang sama juga terjadi pada sarana Ruang Laboratorium Fisika dan Kimia di mana sekolah penerima DAK tidak memiliki sarana prasarana Ruang Laboratorium Fisika dan Kimia yang memadai sesuai acuan PerMen No. 40 Tahun 2008. Hanya 21 persen sekolah yang memiliki Ruang Laboratorium Fisika dan 18,5 persen sekolah yang memiliki Ruang Laboratorium Kimia. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk mata pelajaran dasar masih belum lengkap.

Di beberapa tempat, kegiatan DAK untuk pembangunan ruang praktik siswa dan ruang kelas baru telah dimulai oleh SMK melalui dana partisipasi sekolah (swadaya). Sekolah-sekolah SMK telah menyiapkan rencana pembangunan (detail engineering desain) dan siap melaksanakan pembangunan. Anggaran DAK Fisik Penugasan Pendidikan sangat bermanfaat bagi SMK karena dapat mempercepat peningkatan sarana prasarana yang menunjang kualitas layanan pembelajaran. Menu ruang praktik siswa baru dan ruang kelas sangat bermanfaat bagi SMK. Selama ini kedua menu tersebut menjadi pilihan prioritas dalam pengusulan khususnya di Jawa Barat. Penerima manfaat sekolah SMK merasakan manfaat dari bantuan pembangunan ruang praktik siswa baru, ruang kelas, dan peralatan praktik untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. Dalam pengusulan DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Tahun 2019, Dinas Pendidikan Jawa Barat langsung memasukkan data ke dalam aplikasi KRISNA. Tidak ada arahan (tidak ada intervensi) dari Bappeda dalam setiap usulan yang diakomodir untuk kemudian masuk ke dalam RKPD. Keterbatasan SDM Bappeda menjadi persoalan sehingga mekanisme validitas usulan DAK, terutama untuk menyelaraskan dengan arah pembangunan sesuai prioritas daerah. Selain itu, proses pengalokasian DAK belum memiliki sistem yang menjamin tidak adanya duplikasi/penghitungan ganda dari sumber pendanaan lain.

Analisis Kesenjangan Perencanaan Pembangunan di Sektor Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Nasional Tahun 2019, pemerintah telah memetakan aspek kewilayahan dari status akreditasi sekolah. Tujuan peningkatan akreditasi sekolah akan dilakukan dengan menggunakan APBN, APBD dan lainnya untuk mendorong tercapainya

peningkatan akreditasi sekolah. DAK Fisik Bidang Pendidikan dikhususkan untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka mendukung target pemerintah. Pada tahun 2019, Pemerintah mengalokasikan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan total anggaran sebesar 2.308,2 miliar rupiah untuk 34 provinsi.



Gambar 1.
Lokasi Prioritas untuk Meningkatkan Akreditasi Sekolah pada tahun 2019
Sumber: Diolah dari Pemerintah RI, 2018c

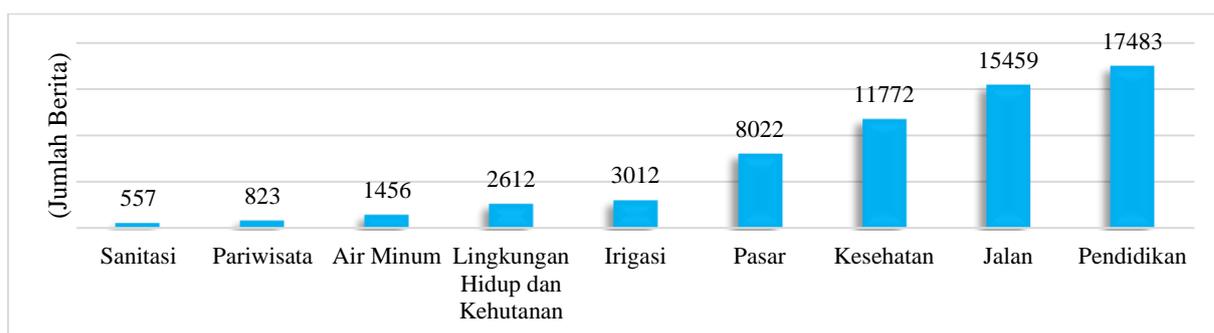
Indikator sektor pendidikan dalam Perpres 72/2018 tentang RKP 2019 menyebutkan bahwa persentase SMK sederajat dengan akreditasi minimal B sebesar 84,6 persen. Berdasarkan tinjauan terhadap kebijakan tersebut dan dari sisi pengalokasian anggaran DAK di daerah provinsi, terdapat ketidaksinkronan arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perpres 72/2018 dengan besaran alokasi anggaran DAK fisik, khususnya Penugasan Bidang Pendidikan. DAK yang dialokasikan belum melihat lokasi prioritas yang dapat mendorong peningkatan akreditasi sekolah. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Barat yang tidak termasuk zona hijau dalam lokasi Peta Prioritas Peningkatan Akreditasi Sekolah 2019, namun memiliki alokasi DAK Fisik Penugasan terbesar di Indonesia. Idealnya, daerah dengan zona merah atau lebih dari 50 persen sekolah yang belum terakreditasi minimal B. Hal ini terlihat kontradiktif di mana daerah yang tidak diprioritaskan mendapatkan dana DAK Fisik Penugasan bidang pendidikan justru mendapatkan alokasi terbesar. Penentuan alokasi tidak sepenuhnya mencerminkan besarnya kebutuhan akreditasi sekolah dalam perencanaan pembangunan tahunan nasional karena kewenangan alokasi merupakan domain Kementerian Keuangan. Kementerian PPN/Bappenas tidak memiliki peran yang sama dengan Kementerian Keuangan dalam menentukan alokasi anggaran fisik DAK Penugasan,

sehingga alokasi anggaran DAK belum secara optimal mendukung sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan.

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di 34 Provinsi, terdapat 7 (tujuh) Provinsi yang tidak mengalokasikan kegiatan pendidikan yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Pendidikan. Provinsi tersebut adalah Kalimantan Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan.

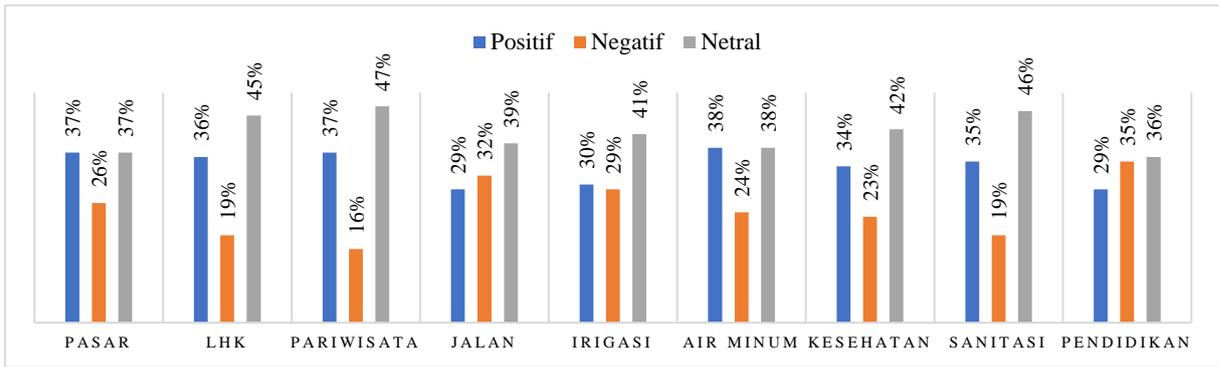
Analisis Berita (Big Data) DAK Bidang Pendidikan

Analisis Pemberitaan DAK Bidang Pendidikan memotret pemberitaan DAK bidang pendidikan di media massa nasional, serta mengulas poin-poin yang menjadi temuan untuk menjadi rekomendasi perbaikan DAK bidang pendidikan ke depan. Penelusuran analisis ini menggunakan platform IMM dari bulan Januari hingga Oktober 2019.



Gambar 2.
Jumlah Pemberitaan tentang DAK Sepanjang Tahun 2019
Sumber: Diolah dari *Intelligent Media Management*, 2019

Berdasarkan urutan jumlah pemberitaan DAK Fisik tahun 2019 yang terangkum dalam Gambar 2, terlihat bahwa bidang pendidikan yang diliput oleh media sebanyak 17483 pemberitaan merupakan bidang yang paling banyak diberitakan oleh media, di antara 9 (sembilan) bidang penugasan DAK. Terlepas dari besarnya perhatian publik, dilakukan analisis sentimen, yaitu proses memahami, mengekstraksi dan memproses data tekstual secara otomatis untuk mendapatkan informasi sentimen yang terkandung dalam sebuah kalimat opini. Tugas dasar dalam analisis sentimen adalah mengelompokkan polaritas teks dalam sebuah dokumen, kalimat, atau fitur/aspek level dan menentukan apakah itu positif, negatif, atau netral.



Gambar 3.
Sentimen Pemberitaan DAK Fisik Penugasan 2019
Sumber: Diolah dari *Intelligent Media Management*, 2019

Berdasarkan grafik sentimen DAK Penugasan Fisik 2019 pada Gambar 3, terlihat bahwa sektor pendidikan mendapatkan sentimen negatif paling banyak dibandingkan dengan sektor lainnya dengan porsi pemberitaan negatif sekitar 35 persen. Berikut beberapa berita terkait DAK Penugasan Fisik Bidang Pendidikan. Untuk menganalisis jenis permasalahan yang sering muncul dalam pemberitaan dengan melihat top isu secara keseluruhan.



(a) *Word cloud*

(b) *Trending topics*

Gambar 4.
Word Cloud dan Trending Topics DAK 2019
Sumber: Diolah dari *Intelligent Media Management*, 2019

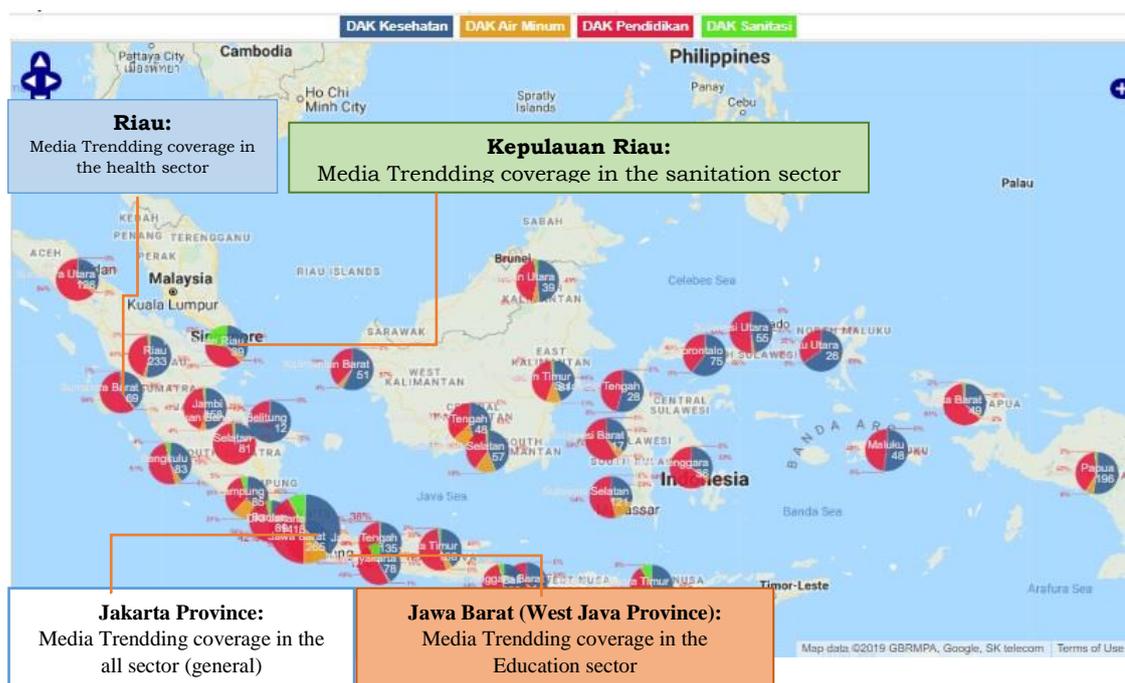
Pemberitaan dengan sentimen negatif terkait DAK Bidang Pendidikan menunjukkan bahwa korupsi menjadi kasus utama dan Trending topik pada hampir semua pemberitaan DAK Bidang Pendidikan. Isu utama yang banyak diberitakan adalah "korupsi", "laporan keuangan belum sinkron", dan "penetapan sekolah penerima DAK dipertanyakan". Berdasarkan pemberitaan tersebut dapat disimpulkan bahwa DAK di sektor pendidikan merupakan objek yang rawan dikorupsi mulai dari proses penganggaran, perencanaan, hingga pelaksanaan proyek. Selain kasus korupsi, DAK Bidang Pendidikan juga memiliki

masalah pada penentuan sekolah penerima DAK karena masih ada beberapa sekolah yang lebih membutuhkan dan memprihatinkan yang belum merasakan manfaat anggaran DAK.

Sektor pendidikan membutuhkan lebih banyak perhatian dari pemerintah. Hasil IMM menunjukkan bahwa bidang ini paling banyak mendapat perhatian publik dan paling banyak mendapat sentimen negatif.

Analisis Penilaian Lapangan: Kasus di Jawa Barat

Penilaian lapangan DAK Penugasan Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2019 dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat. Kunjungan lapangan di Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam bentuk diskusi (*Focused Discussion Groups*), wawancara dan pengamatan langsung di lokasi pembangunan/pelaksanaan kegiatan DAK. Salah satu pertimbangan pemilihan Provinsi Jawa Barat sebagai lokus studi kasus didasarkan pada anggaran DAK Bidang Pendidikan yang paling besar di lokasi tersebut dan berdasarkan informasi sentimen publik dalam *Intelligent Media Management*.



Gambar 5.

Informasi "Trending topik" media terkait DAK 2019

Sumber: Diolah dari *Intelligent Media Management*, 2019

Analisis komparatif digunakan dalam menentukan daerah yang paling banyak muncul dalam pelaporan DAK Fisik Penugasan 2019. Analisis ini menggunakan fasilitas komparasi peta yang membandingkan sebaran dan volume topik pemberitaan. Fitur

perbandingan peta mencakup pemantauan sebaran isu utama dari perspektif wilayah untuk melihat penyebaran isu. Perbandingan peta terintegrasi dengan peta *Google Earth*. Berdasarkan berita dan laporan yang ada, sistem akan secara otomatis memberikan analisis mengenai lokasi-lokasi yang disorot dalam isu tersebut.

Peta perbandingan yang ditunjukkan pada Gambar 5 menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta menjadi lokasi yang paling banyak disoroti dalam laporan DAK (umum). Hal ini tidak lepas dari peran Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara di mana seluruh kantor pemerintahan pusat berada di wilayah tersebut. Meskipun begitu, yang menjadi sorotan publik adalah cakupan spesifik dari setiap daerah DAK di masing-masing daerah. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat menjadi lokasi "Trending pemberitaan" media terkait DAK 2019 bidang Pendidikan.

Berdasarkan analisis kesenjangan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah di 34 Provinsi, Provinsi Jawa Barat mengalokasikan kegiatan pendidikan yang bersumber dari Penugasan Fisik DAK Bidang Pendidikan. Misalkan ukurannya hanya kesesuaian menu DAK dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Nasional dan prioritas dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. Dalam hal ini, Jawa Barat merupakan provinsi yang secara konsisten mendukung target nasional untuk sektor pendidikan. Dukungan Jawa Barat terhadap sektor pendidikan didasari oleh kondisi bahwa provinsi ini memiliki jumlah sekolah terbanyak di Indonesia sehingga secara umum cenderung sejalan dengan target nasional "belanja wajib" untuk sektor pendidikan. Hasil analisis yang menarik adalah sekolah-sekolah di Jawa Barat secara umum berada pada zona hijau akreditasi sekolah sehingga dari sisi evaluasi pembangunan, alokasi DAK ini seharusnya lebih tepat diberikan kepada provinsi yang berada pada zona merah, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 tentang Lokasi Prioritas Peningkatan Akreditasi Sekolah Tahun 2019.

Pada saat kunjungan lapangan dilakukan, Provinsi Jawa Barat sampai dengan bulan Mei 2019 belum memiliki realisasi anggaran DAK Penugasan Bidang Pendidikan. Meskipun demikian, beberapa kegiatan supervisi dan pembinaan telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan namun belum tercatat sebagai realisasi keuangan. Dinas Pendidikan Jawa Barat sebagai pengelola DAK, telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis serta melakukan verifikasi persiapan pelaksanaan kegiatan DAK di setiap SMK. Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan DAK Penugasan Fisik Bidang Pendidikan di Jawa Barat, permasalahan dan kendala dikelompokkan berdasarkan aspek regulasi, kelembagaan dan pendanaan/alokasi dana.

Permasalahan regulasi seputar pelaksanaan DAK Fisik ini terkait dengan petunjuk teknis. Secara umum pelaku DAK di daerah menyatakan bahwa telatnya penerbitan petunjuk operasional oleh K/L teknis pengampu bidang DAK menghambat upaya akselerasi yang ingin dilakukan pemerintah daerah. Pada kasus lain pemerintah daerah memandang proses penyusunan petunjuk operasional DAK yang tidak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dapat menyebabkan program atau proyek yang diusulkan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ketika petunjuk teknis sudah terbit bukan berarti masalah telah selesai. Tidak optimalnya sosialisasi berdampak petunjuk operasional DAK dinilai tidak jelas atau ambigu oleh daerah yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda di tingkat daerah. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam perencanaan dan implementasi program atau proyek yang akan didukung oleh DAK. Pemerintah daerah menilai petunjuk operasional DAK oleh K/L pengampu terlalu rumit dan administratif (kompleks) yang dalam operasionalisasinya seringkali dapat menjadi kendala dalam penggunaan dana tersebut.

Birokrasi yang berbelit-belit dan persyaratan yang sulit dipenuhi dapat memperlambat proses dan meningkatkan beban administratif bagi pemerintah daerah. Petunjuk operasional DAK yang disusun secara umum dinilai hanya mencerminkan prioritas pemerintah pusat, dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nyata di tingkat daerah. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas dan kemandirian pemerintah daerah dalam menentukan program yang paling sesuai untuk masyarakat setempat.

Hal terakhir yang disoroti pemerintah daerah adalah waktu penyaluran DAK yang tidak tepat atau terlambat sehingga dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program atau proyek dengan baik. Jika dana tidak tersedia tepat waktu, proyek-proyek pembangunan bisa terhambat atau tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal. Petunjuk Teknis penggunaan DAK Fisik Penugasan tahun 2019 mensyaratkan jumlah minimal 200 siswa. Persyaratan ini sulit dipenuhi untuk SMK baru dengan lokasi terpencil yang tidak memiliki jumlah siswa yang disyaratkan. Juknis penggunaan DAK tahun 2019 belum dapat mengakomodir SMK-SMK kecil yang tersebar di daerah terpencil yang belum memiliki jumlah siswa ideal sesuai ketentuan. Juknis perlu didorong agar SMK di daerah terpencil mendapatkan bantuan DAK, terutama dalam mendukung pembangunan Ruang Kelas Baru dan Ruang Praktik Siswa di sekolah. Selain itu, beberapa sekolah (kasus di Provinsi Jawa Barat) memiliki bangunan yang masuk dalam kategori cagar budaya.

Peraturan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2019 belum mengklasifikasikan peruntukan sekolah.

Permasalahan kelembagaan terjadi pada tingkat peran dan fungsi: 1) Penerima manfaat; 2) Dinas Pendidikan Provinsi; 3) Bappeda Provinsi; dan 4) Pemerintah Pusat. Pada fungsi penerima manfaat, terjadi keterlambatan pelaksanaan oleh Sekolah Menengah Kejuruan. Kontrak/tender pembangunan baru akan dilaksanakan oleh sekolah pada bulan Juni dan Juli 2019. Pada fungsi dinas teknis daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum memiliki mekanisme dalam menentukan keabsahan data sekolah yang akan diusulkan dalam aplikasi KRISNA (contohnya data gedung sekolah yang rusak). Masih terdapat kesenjangan dalam penganggaran DAK untuk SMK. Beberapa sekolah yang memiliki akses informasi dan kemampuan dalam menyusun proposal akan berpeluang besar untuk mendapatkan bantuan DAK. Sebaliknya, sekolah yang tidak memiliki akses informasi (karena masalah jarak dan telekomunikasi) dan kapasitas penyusunan proposal yang belum optimal, sangat kecil peluangnya untuk mendapatkan alokasi DAK. SMK mengajukan proposal bantuan DAK melalui website Takola, dan proposal yang masuk ke dalam sistem Takola akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk kemudian diusulkan ke Kementerian Pendidikan melalui aplikasi KRISNA.

Penentuan sekolah yang mendapatkan bantuan perlu ditinjau ulang. Di lapangan, sekolah yang memiliki kualitas yang baik selalu mendapatkan bantuan (termasuk bantuan DAK), sedangkan sekolah yang tidak memiliki standar pelayanan yang memadai tidak mendapatkan bantuan. Padahal, bantuan fisik DAK Penugasan Bidang Pendidikan memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (standar sarana prasarana SMK yang diatur dalam Permendiknas No. 40 Tahun 2008). Pada sisi lain, sistem pengawasan terhadap sumber-sumber pendanaan sekolah masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, perlu ada sistem pengawasan berlapis untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih sumber pendanaan kegiatan sekolah.

PENUTUP

Hasil penelitian menemukan beberapa kendala, antara lain: 1) Disparitas kemampuan sumber daya manusia dalam menyusun proposal serta perbedaan aksesibilitas informasi antara pengelola SMK di perkotaan dan perdesaan; 2) Belum optimalnya perencanaan anggaran dalam pengusulan DAK; 3) Belum optimalnya ruang praktik siswa karena belum tersedianya peralatan dan perlengkapan praktik; 4) Penentuan alokasi belum sepenuhnya

mencerminkan besarnya kebutuhan akreditasi sekolah; 5) Kurangnya transparansi dan audit publik dalam pengelolaan DAK Bidang Pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan DAK Penugasan Fisik Bidang Pendidikan. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk perbaikan pelaksanaan DAK Penugasan Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut: 1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu memiliki peran yang sama dengan Kementerian Keuangan dalam menentukan alokasi anggaran DAK untuk memastikan target-target Perencanaan Pembangunan Tahunan Nasional tercapai secara optimal; 2) Meningkatkan koordinasi dan perlu adanya sistem pelaporan satu pintu melalui aplikasi Krisna yang dapat diakses oleh seluruh pelaku DAK pusat dan daerah; 3) Perlu adanya keterlibatan lembaga pengawas pelayanan publik (Ombudsman RI) dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik sekaligus meminimalisir peluang penyalahgunaan anggaran DAK Penugasan khususnya Bidang Pendidikan; 4) Perlunya peningkatan koordinasi dan peran aktif pemerintah daerah, untuk memenuhi mekanisme dan persyaratan pencairan DAK sesuai dengan regulasi yang diatur oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan); Perlunya sistem pelaporan satu pintu melalui aplikasi Krisna yang dapat diakses oleh seluruh pelaku DAK pusat dan daerah; 5) Perlunya pengembangan sistem monitoring dan evaluasi secara bersama-sama yang melibatkan setiap pemangku kepentingan (pusat dan daerah) dengan kewajiban pengalokasian anggaran Monev pada Juknis di setiap tahapan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan DAK.

Sektor pendidikan membutuhkan lebih banyak perhatian dari pemerintah. Hasil IMM menunjukkan bahwa sektor pendidikan paling banyak mendapat sorotan publik dan paling banyak menerima sentimen negatif. Pemerintah pusat perlu menekankan pada peningkatan kualitas perencanaan DAK di sektor pendidikan yang lebih tepat sasaran, baik lokasi maupun alokasi anggaran. Pemerintah perlu memperbarui sistem basis data terbaru dan kondisi sekolah yang terintegrasi dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten untuk mendapatkan data yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akilah, F. (2019). Manajemen Perencanaan Sumber Daya Manusia Di Bidang Pendidikan: Manifestasi Dan Implementasi. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 11(1), 81-94. <https://doi.org/10.30863/didaktika.v11i1.156>.
- Amelia, D., Arfan, M., & Abdullah, S. (2019). Analisis belanja daerah sektor pendidikan sebagai pemediasi pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, DAK, dan pendapatan asli daerah terhadap outcomes bidang pendidikan pada pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 5(1), 48-69. <https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.13822>.
- Bonet, J. (2006). Fiscal decentralization and regional income disparities: evidence from the Colombian experience. *The Annals of Regional Science*, 40(3), 661–676. <https://doi.org/10.1007/s00168-006-0060-z>.
- Faridi, M. Z. (2011). Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 31(1), 1-33.
- Pemerintah RI. (2018a). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia). (2)
- Pemerintah RI. (2018b). Peraturan Presiden No. 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia). (2)
- Pemerintah RI. (2018c). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia). (2)
- Pemerintah RI. (2018d). Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019. Indonesia: Pemda Jawa Barat (Government of Indonesia).
- Pemerintah RI. (2004a). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).
- Pemerintah RI. (2004b). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia).

- Hirawan, S. B. (2007). [Desentralisasi fiskal sebagai suatu upaya meningkatkan penyediaan layanan publik \(bagi orang miskin\) di Indonesia](#). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 21-34.
- Ibrahim, F. N. A. & Abdul, I. (2019). [Effect of Special Allocation Fund \(DAK\), Capital Expenditures, and Investment on Economic Growth in the Sulawesi Region](#). *Jambura Equilibrium Journal*, 1(1), 38 - 46. <https://doi.org/10.37479/jej.v1i1.2000>.
- Larasati, D., & Saputra, H. (2014). [Analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap aksesabilitas pendidikan di Indonesia periode sebelum dan setelah desentralisasi fiskal](#). *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 7(1), 19-31. Retrieved from <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/84>.
- Marzel, P. (2013). [Pengaruh DAK, dan Pendapatan Asli Daerah \(PAD\) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012](#). *Jurnal EMBA 1189*, 1(4), 1189 – 1197. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2892>.
- Mutiah. (2017). [Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan DAK pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah](#). (Studi Empiris di 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2014). *Research Journal of Finance and Accounting*, 8 (1), 107 - 126.
- Pambudi, A.S., Deni, Hidayati, S., Putri, D.A.C., & Wibowo, A. D. C. (2021). [Special Allocation Fund \(DAK\) for Education Sector: A Development Evaluation Perspective of Fiscal Year 2019](#). *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 29 (1), 41-58. <https://doi.org/10.14203/JEP.29.1.2021.41-58>.
- Pambudi, A.S. (2021). [Evaluasi On Pemerintah RIng DAK Fisik Bidang Pendidikan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease-19 Berbasis Intelligence Media Management \(IMM\)](#). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(2), 1-7. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i2.1792>.
- Permatasari, I., & Mildawati, T. (2016). [Pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja modal pada kabupaten/Kota Jawa Timur](#). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(1), 1-17.
- Santoso, E., & Sapari, S. (2017). [Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap belanja modal](#). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3), 1252 – 1269.

- Tuasikal, A. (2008). [Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia](#). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1(2), 124-142. Retrieved from <https://jurnal.usk.ac.id/TRA/article/view/299>
- Wandira, A. G. (2013). [Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal](#). *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 44-51. <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1158>